

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Prov Kalimantan Selatan

a. Sejarah singkat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh Indonesia. BAZNAS memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan mengenai pengumpulan dan distribusi ZIS yang dikelolanya kepada Presiden Republik Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, yang lebih dikenal sebagai BAZNAS Kalimantan Selatan, adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0182/KUM/2016. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan peraturan tersebut, BAZNAS Kalimantan Selatan berperan strategis sebagai lembaga

non-struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pemerintah dalam pengelolaan zakat di wilayahnya.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, 70114. Lembaga ini didirikan pada tahun 1982 setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan saat itu, H. M Said. Berada di dekat Masjid Raya Sabilal Muhtadin, lembaga ini awalnya didirikan dengan nama Zakat dan Wakaf (ZAWA) pada tahun 1979, di bawah pimpinan H. M. Rafiie Hamdie. Pimpinan kemudian dialihkan kepada H. Maksid (1994–1997), dan pada tahun 1995, ZAWA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS).

Prof. Dr. H. Aswadie Syukur, Lc. menjabat sebagai pimpinan BAZIS pada periode 1997-2000. Namun, karena kesibukan lain, beliau menyerahkan kepemimpinan kepada H. Umar Yasin, BA. H. Umar Yasin terpilih kembali sebagai pimpinan untuk periode 2000-2004 dan terus memimpin hingga tahun 2007. Di bawah kepemimpinan beliau, BAZIS mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Antara tahun 2007 hingga 2010, Kepala Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dijabat oleh Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. Selama masa jabatannya, BAZDA berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun 2011, nama BAZDA diubah kembali menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR sebagai pimpinan yang menjabat dari tahun 2011

hingga 2014. Beliau terpilih kembali untuk masa jabatan 2015-2020. Di bawah kepemimpinan beliau, BAZNAS Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk melakukan studi banding ke BAZNAS Jawa Timur pada tahun 2013, BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2014, dan kembali ke BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2015. Studi banding ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan rumah sehat, khususnya terkait rencana pendirian Rumah Sehat di Banjarbaru, serta untuk mempelajari keberhasilan penghimpunan zakat dan program Zakat Community Development (ZCD). Studi ke Padang difokuskan pada keberhasilan penghimpunan zakat dan program ZCD, sedangkan kunjungan ke BAZNAS Pusat bertujuan untuk peningkatan program ZCD. Selain itu, selama masa jabatannya, BAZNAS Kalimantan Selatan menerbitkan buletin mengenai zakat, infak, dan sedekah (ZIS), meresmikan posko zakat di Pasar Wadai setiap Ramadhan pada tahun 2013, mendirikan Kota Infak dan Sedekah di depan Kantor Pos Banjarmasin untuk meningkatkan penghimpunan ZIS selama Ramadhan, serta memasang iklan di surat kabar untuk mempromosikan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

b. Visi dan Misi BAZNAS Prov Kalsel

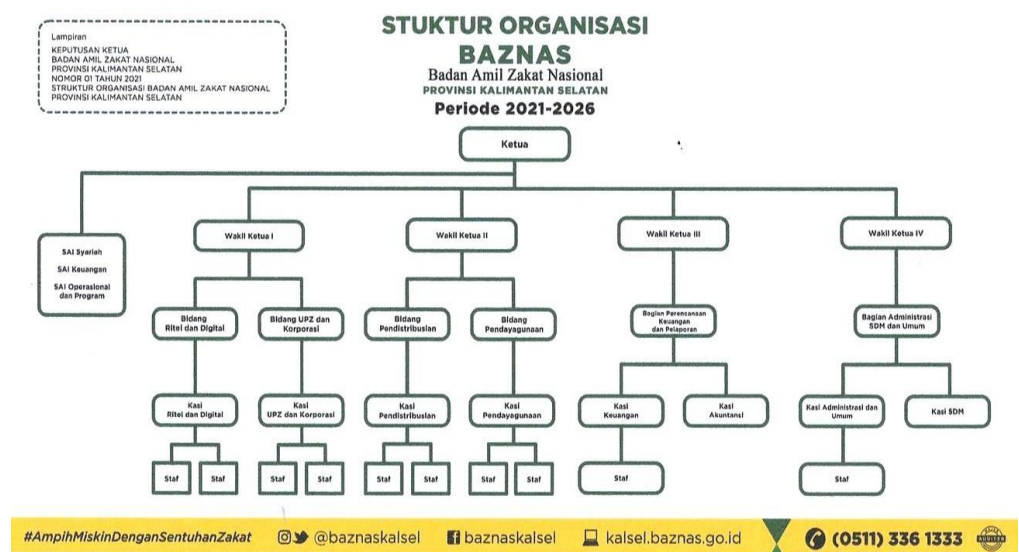
BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan didirikan dengan visi "Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat." Adapun misi lembaga ini mencakup beberapa aspek, yaitu sosialisasi yang tepat, pengumpulan yang akurat, pendistribusian dan pemanfaatan yang tepat, serta

pembangunan kapasitas atau pengembangan kemampuan.

c. Struktur Organisasi BAZNAS Prov Kalsel

Keputusan Kepala Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2019 menetapkan pedoman untuk penyelenggaraan dan pengelolaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam keputusan tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur pembentukan struktur organisasi BAZNAS Kalimantan Selatan, yang akan disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi BAZNAS Prov Kalsel



Sumber: Dokumen BAZNAS Kalsel

Berdasarkan struktur kepengurusan yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini adalah penjelasan tugas dan kewajiban masing-masing komponen dalam struktur:

1) Ketua

- Mengawasi pelaksanaan seluruh program BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan.

- b) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tentang penghimpunan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah.
- c) Menyusun strategi penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah.
- d) Melaksanakan tugas Gubernur dan DPRD Daerah Tingkat I.

2) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

- a) Mendukung Ketua dalam melaksanakan tugas BAZNAS di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam mengawasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.
- b) Merencanakan dan mengarahkan pelaksanaan setiap kegiatan yang terkait dengan penghimpunan dana zakat.
- c) Mempertanggungjawabkan hasil penghimpunan kepada Ketua.

3) Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan bidang.
- b) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola pengelolaan alokasi dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah.
- c) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyaluran dan pendayagunaan dana kepada ketua.

4) Wakil Ketua III (Bidang Keuangan, dan Pelaporan)

- a) Membantu ketua dalam mengelola kegiatan BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.

- b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di bidang keuangan dan pelaporan.
- c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan keuangan dan pelaporan kepada ketua.

5) Wakil Ketua IV (Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum)

- a) Mendampingi ketua dalam menjalankan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait dengan pengelolaan kesekretariatan, sumber daya manusia (SDM), dan urusan umum.
- b) Mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan, SDM, dan urusan umum.
- c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan administrasi, pengelolaan SDM, dan urusan umum kepada ketua.

6) Satuan Audit Internal

- a) Melakukan audit terhadap kegiatan, manajemen, mutu, dan kepatuhan internal di lingkungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Satuan Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada ketua.
- b) Melaksanakan berbagai kegiatan, seperti menyusun program audit, melaksanakan audit, melakukan audit

dengan tujuan tertentu sesuai instruksi ketua, menyusun laporan hasil audit, dan mempersiapkan audit oleh pihak eksternal.

7) Bagian Pengumpulan

- a) Menyusun strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.
- b) Mengelola dan mengembangkan data muzakki (donatur).
- c) Menyelenggarakan kampanye zakat, infak, dan sedekah.
- d) Mengawasi dan mengendalikan proses penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
- e) Memberikan layanan yang optimal kepada para *muzakki*.
- f) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
- g) Menyusun laporan serta pertanggungjawaban terkait kegiatan penghimpunan dana ZIS.
- h) Menjalankan tata kelola pelayanan dan menindaklanjuti keluhan yang diajukan oleh muzakki.

8) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a) Merancang strategi untuk pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah.
- b) Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan dana bagi mustahik (penerima manfaat).
- c) Melaksanakan dan mengawasi proses distribusi dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.
- d) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendistribusian

dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

- e) Menyusun laporan serta pertanggungjawaban mengenai kegiatan distribusi dan pemanfaatan dana ZIS.

9) Bagian Keuangan dan Pelaporan

- a) Menyusun rencana strategis pengelolaan zakat di tingkat kabupaten atau kota.
- b) Merancang rencana pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Mengelola keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- e) Menyusun dan mengelola sistem akuntansi yang diterapkan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

10) Bagian SDM dan Umum

- a) Menyusun strategi pengelolaan Amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Melaksanakan perencanaan terkait Amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Melaksanakan proses rekrutmen Amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Melaksanakan program pengembangan Amil di BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan.

- e) Mengelola administrasi perkantoran di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- f) Merancang strategi komunikasi dan hubungan masyarakat untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- g) Melaksanakan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- h) Mengelola pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
- i) Memberikan rekomendasi terkait pembukuan untuk perwakilan LAZ di tingkat provinsi Kalimantan Selatan.

2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

a. Sejarah Singkat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Didirikan pada 10 Juni 1972, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) merupakan perkumpulan para pengusaha muda di Indonesia oleh Dr. Abdul Latief dan Ir. Mahdi Diah, dengan tujuan menumbuhkan pola pikir kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia. HIPMI merupakan lembaga yang dibentuk untuk membina, mendukung, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda agar menjadi wirausahawan tangguh, tangguh, dan profesional di berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, HIPMI berperan aktif memajukan

perekonomian nasional, khususnya dengan membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pemberian pinjaman modal. Selain itu, HIPMI juga turut berkontribusi dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah, seperti mendukung kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski menghadapi berbagai tantangan.

b. Visi dan Misi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Visi dan misi organisasi HIPMI dijabarkan sebagai berikut:

1) Visi

- a) Mewujudkan HIPMI sebagai platform bagi pengusaha yang tangguh, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi di era Industri 4.0.
- b) Menjalin kerja sama antara HIPMI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka membangun kemitraan strategis.
- c) Mendorong anggota HIPMI untuk mengembangkan wirausahawan muda dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik di tingkat regional maupun nasional.

2) Misi

- a) Meningkatkan kemampuan kader HIPMI dalam mengembangkan usaha melalui pelatihan dan forum bisnis.
- b) Menyebarkan semangat kewirausahaan kepada generasi muda.

- c) Mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan kader HIPMI dalam pembangunan daerah.
- d) Mengajak kader untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang melibatkan wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Kalimantan Selatan serta pengurus atau anggota perwakilan HIPMI Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Informan Pertama

Nama: Muhammad Arsyad, SE

Agama: Islam

Jabatan: Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Berdasarkan informasi dari informan pertama, informan mengatakan:

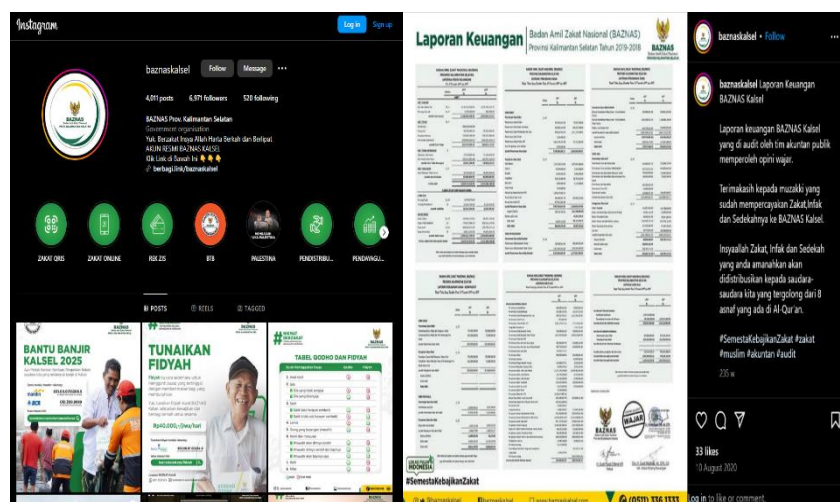
“Mengenai transparansi ya, jadi alhamdulillah ini sebenarnya berkaitan jawabannya antara transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Karena ini dua hal yang sebenarnya berkaitan. Dari sisi transparansinya itu selalu melaporkan ke beberapa stakeholder. Yang pertama pemerintah, kita wajib melaporkan sebulan per tahun, yang kedua itu ada muzaki dan yang ketiga kepada masyarakat. Pada umumnya jika berhubungan dengan transparansi, itu bisa mendapatkan laporan langsung mengakses laporan bulanan kami di websitenya BAZNAS. Jadi transparansi itu ada beberapa barometer yang ditetapkan oleh BAZNAS RI. BAZNAS setiap tahun membuat laporan analisis rasio dan transparansi yang juga di upload di website BAZNAS dan juga diawasi oleh BAZNAS RI setiap tahunnya. Dan sistem kami itu sudah terintegrasi se-

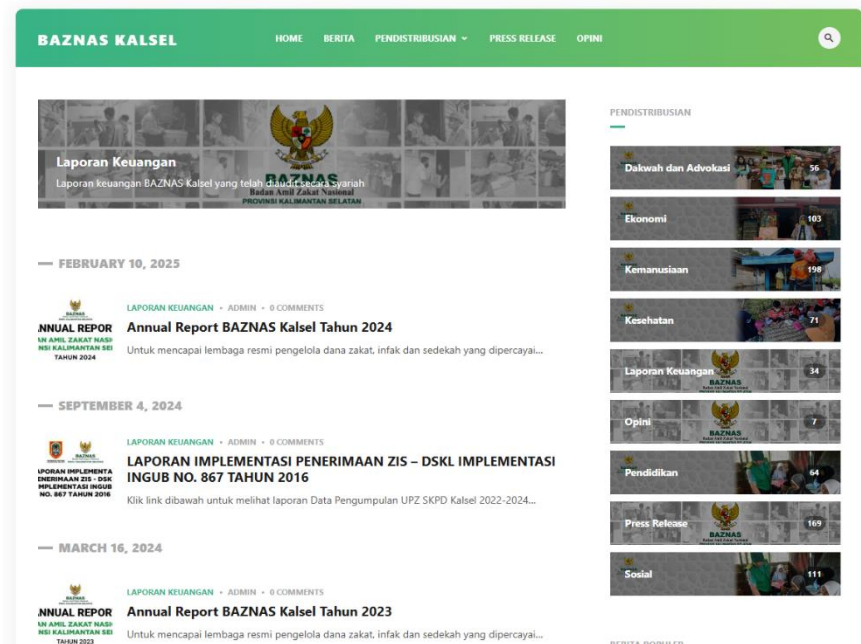
Indonesia. Jadi Baznas RI setiap hari sudah memantau sistem kami yang namanya SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS)” (Muhammad Arsyad, SE, wawancara pribadi, 6 Februari 2025).

Berdasarkan temuan data hasil wawancara, bahwa dalam transparansi, BAZNAS Kalsel selalu melaporkan ke beberapa stakeholder seperti pemerintah, muzakki, dan juga kepada masyarakat. BAZNAS setiap tahun juga membuat laporan analisis rasio dan transparansi yang juga di upload di website BAZNAS dan juga di awasi oleh BAZNAS RI. BAZNAS menggunakan berbagai saluran untuk menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada publik melalui website publik BAZNAS. Selain itu, Baznas juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Tampilan situs web resmi BAZNAS

Kalimantan Selatan (<https://kalsel.baznas.go.id>) dan akun media sosial Instagram dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait laporan keuangan dan transparansi.



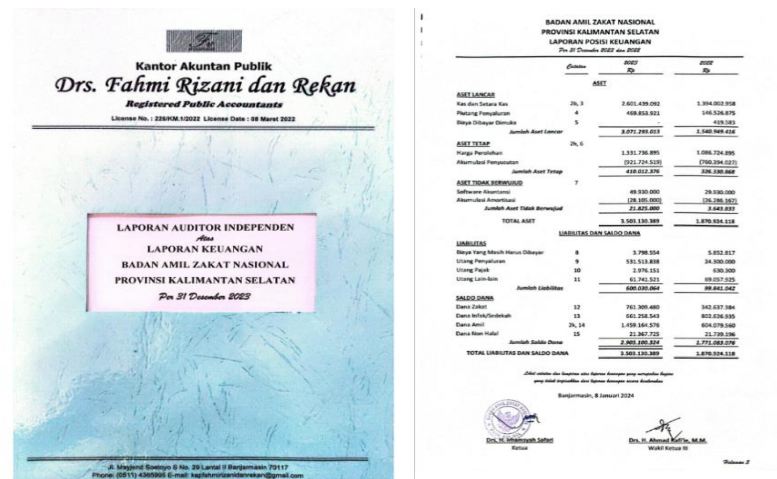


Informan menjelaskan bahwa mengenai transparansi BAZNAS Kalsel selalu melaporkan ke beberapa stakeholder. Untuk menyampaikan pelaporan BAZNAS menggunakan berbagai saluran seperti website resmi dan juga platform sosial media. Selain itu, sejauh ini BAZNAS Kalsel belum pernah ada kritik terkait kurangnya transparansi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh komitmen Baznas dalam menerapkan prinsip keterbukaan sejak awal.

BAZNAS Kalimantan Selatan juga melibatkan pihak internal dan eksternal dalam proses audit keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Salah satu pihak yang berpartisipasi dalam proses ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki tanggung jawab dalam proses audit eksternal terhadap laporan keuangan BAZNAS. Selain itu, ada juga Kementerian Agama yang melakukan audit syariah untuk

memastikan bahwa pengelolaan dana zakat sejalan dengan prinsip Islam. Dan juga ada audit internal dari BAZNAS sendiri yaitu Satuan Audit Internal juga berperan sebagai pengawas independen yang terus mengevaluasi pengelolaan dana zakat secara menyeluruh.

Gambar 4.3 Laporan Keuangan BAZNAS Kalsel yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)



Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani dan Rekan
Registered Public Accountants
License No. : 226708.10022 Licensed Date : 08 Maret 2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Atas
LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Per 31 Desember 2023

	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setor Kasi	2.023.438.002	1.374.002.078
Pinjaman Transaksi	4	488.800.000
Biaya Dibayar Dimuka	5	429.000
Jumlah Aset Lancar	2.023.926.002	1.863.202.078
ASET JANGKA PANJANG		
Pinjaman Perseorangan	1.331.728.895	1.000.724.895
Akumulasi Penyusutan	(202.720.535)	(700.394.871)
Jumlah Aset Jangka Panjang	1.129.008.360	300.330.024
ASET TOTAL/BERKESIDIKAN		
Software Komputer	48.930.000	28.000.000
Akumulasi Amortisasi	(18.100.000)	(18.100.000)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	30.830.000	10.000.000
TOTAL ASET	3.583.584.362	2.173.532.102
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8	5.788.004
Utang Perseorangan	9	333.518.888
Utang Pajak	10	2.976.153
Utang Lain-lain	11	680.000.000
Jumlah Liabilitas	1.019.283.045	920.212.945
SALDO DANA		
Dana Zakat	12	761.300.480
Dana Infaq/Sedekah	13	681.258.543
Dana Amil	14, 15	1.039.144.576
Dana Khas Khusus	15	21.967.725
Jumlah Saldo Dana	2.503.671.324	1.473.563.844
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	3.583.584.362	2.173.532.102

Atas nama dan jabatan atas laporan keuangan yang diperiksa
yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik ini, berdasarkan:

Banjarmasin, 8 Januari 2024

Drs. H. Ahmad Rafie, M.M.
Anggota Kantor AP

Gambar 4.4 Postingan media sosial BAZNAS Kalsel yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, termasuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa

Baznas Kalsel's post

Baznas Kalsel
25 October 2024 · 🌐

Transparansi dan Akuntabilitas, 6 BAZNAS Kabupaten/Kota di Kalsel Berhasil Raih Opini WTP Banjarmasin, 24 Oktober 2024 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kalimantan Selatan kembali mendapatkan predikat memuaskan dengan prestasi membanggakan. Sebanyak enam lembaga amil zakat dari kabupaten/kota di provinsi ini berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023.

Berita Selengkapnya, Kunjungi: <https://kalsel.baznas.go.id/.../transparansi-dan-.../>



Enam BAZNAS dari kabupaten/kota di Kalimantan Selatan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023. Prestasi ini diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Balangan, dan Kota Banjarmasin, yang secara simbolis menerima sertifikat WTP di Kantor BAZNAS Banjarmasin.

Wakil Ketua III BAZNAS Kalsel, H. Ahmad Rafie, menyatakan bahwa predikat ini adalah hasil kerja keras pengurus dan pengelola BAZNAS. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta penggunaan sistem aplikasi SIMBA yang membantu dalam laporan keuangan dan monitoring program. Rafie berharap pencapaian ini dapat menginspirasi BAZNAS di daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, 6 BAZNAS KABUPATEN/KOTA DI KALSEL BERHASIL RAIH OPINI WTP

1 Like Comment

Pengecualian) dalam laporan keuangan.

Informan menjelaskan mengenai mekanisme akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Kalsel, informan mengatakan:

“Akuntabilitas terkait dengan pertanggung jawaban BAZNAS terhadap dana yang dikelola yang didapat dari Muzaki maupun dana lainnya. Jadi kami pastinya setiap tahun, itu untuk dana ZIS yang dikelola, termasuk juga dana hibah dari Pemda, itu kami selalu diaudit oleh kantor akutan publik. Artinya ada audit eksternal yang mengaudit kami dari sisi eksternal, Terus dari sisi internal, kami ada yang namanya satuan audit internal. Terus dari sisi pemerintah, itu ada yang namanya audit syariah. Nah, jadi tiga hal tadi selalu kami jalani setiap tahunnya untuk yang berkaitan dengan akuntabilitas. Dan Alhamdulillah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selalu mendapatkan hasil yang baik. Nah kalau dari akutan publik itu WTP gitu kan syariah itu nilainya syariah, dari SAI juga selalu bergerak dalam lakukan pemeriksaan” (Muhammad Arsyad, SE, wawancara pribadi, 6 Februari 2025).

Akuntabilitas di sini berarti bahwa BAZNAS Kalsel bertanggung jawab atas dana yang mereka kelola, baik yang berasal dari muzaki atau pemberi zakat maupun sumber lain seperti hibah dari pemerintah daerah. Untuk memastikan bahwa dana dikelola secara tepat dan mematuhi pedoman dan standar yang ditetapkan peraturan yang berlaku, BAZNAS Kalimantan Selatan menjalani audit rutin setiap tahunnya. Audit pertama dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang merupakan pihak eksternal yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kalimantan Selatan disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar dan bebas dari kesalahan material, maka BAZNAS Kalsel dapat memperoleh opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, yang merupakan hasil

audit terbaik. Selain audit eksternal, BAZNAS Kalsel juga memiliki Satuan Audit Internal atau SAI yang melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan dan operasional. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama juga melaksanakan audit syariah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Audit ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan apa yang di dapat dari informan ini diketahui bahwa BAZNAS Kalsel selalu mendapatkan hasil audit yang baik. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan mereka sudah sesuai dengan standar akuntansi dan syariah.

Adapun tantangan yang di hadapi BAZNAS dalam menjaga akuntabilitas, Salah satu tantangan utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah adalah perubahan regulasi dan standar akuntansi yang terus berkembang. Sebagai contoh, sebelumnya pengelolaan keuangan zakat menggunakan standar PSAK 109, namun kini telah diperbarui menjadi PSAK 409. Perubahan ini mengharuskan amil zakat di BAZNAS untuk terus belajar dan memahami aturan terbaru. Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari aspek syariah maupun aspek regulasi pemerintah.

b. Identitas Informan Kedua

Nama: Muhammad Adi Riswan Al Mubarak

Agama: Islam

Jabatan: Kepala Bagian Promosi dan Komunikasi

Berdasarkan informasi dari informan kedua, informan mengatakan:

“Sampai sekarang, BAZNAS belum pernah menawarkan kerja sama langsung ke Hipmi. Tapi ke depan, kami sangat terbuka kalau ada peluang untuk berkolaborasi. Kami paham bahwa komunitas pengusaha seperti Hipmi punya potensi besar dalam mendukung program zakat, baik dari sisi pendanaan maupun ide-ide inovatif untuk memberdayakan masyarakat. Kalau ada kesempatan, kami ingin ngobrol bareng Hipmi untuk cari titik temu supaya bisa bikin program yang saling menguntungkan, baik untuk pengusaha maupun penerima manfaat zakat” ((Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, komunikasi pribadi, 14 Februari 2025).

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dengan informan, bahwa dalam membangun hubungan dengan komunitas lain seperti Hipmi, BAZNAS Kalsel hingga saat ini belum menjalin kerja sama secara langsung dengan Hipmi dalam mendukung program zakat. Namun, ke depan BAZNAS ini sangat terbuka terhadap kemungkinan kolaborasi. Hipmi sebagai komunitas pengusaha memiliki potensi besar dalam mendukung program zakat, baik dari segi pendanaan maupun pengembangan ide-ide inovatif yang dapat membantu pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Kalsel memahami bahwa sinergi dengan komunitas pengusaha dapat memberikan dampak yang lebih luas, sehingga mereka ingin membuka ruang diskusi untuk mencari titik temu dalam menciptakan program yang saling menguntungkan, baik

bagi pengusaha maupun penerima manfaat zakat.

Untuk meningkatkan kepercayaan komunitas pengusaha seperti HIPMI terhadap BAZNAS, transparansi menjadi aspek yang sangat penting. Baznas berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang luas terkait laporan keuangan, pendistribusian dana, serta dampak dari program yang dijalankan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melibatkan komunitas bisnis dalam berbagai kegiatan BAZNAS, seperti kunjungan ke lokasi distribusi zakat atau diskusi bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Informan menjelaskan bagaimana BAZNAS memastikan kompetensi pengelolanya untuk menjaga integritas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah guna membangun kepercayaan publik, seperti yang disampaikan oleh informan:

"Kami punya standar ketat dalam memilih pengelola zakat. Mereka harus punya keahlian di bidangnya, paham aturan syariah, dan yang paling penting, punya integritas tinggi. Selain itu, kami juga melakukan audit secara berkala, baik internal maupun eksternal, supaya tidak ada celah untuk penyalahgunaan dana. Kami juga terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi tim kami, supaya mereka selalu update dengan perkembangan terbaru dalam manajemen zakat. Dengan cara ini, kami ingin memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar amanah dan bisa dipertanggungjawabkan" (Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, komunikasi pribadi, 14 Februari 2025).

Dalam menjaga kompetensi pengelola zakat serta memastikan integritasnya, BAZNAS Kalsel menerapkan standar seleksi yang ketat bagi para pengelolanya. Para pengelola harus

memiliki keahlian di bidangnya, memahami aturan syariah, dan memiliki integritas tinggi agar dana zakat, infaq, dan sedekah dapat dikelola dengan amanah. Selain itu, audit berkala, baik internal maupun eksternal, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyalahgunaan dana. BAZNAS Kalimantan Selatan terus memberikan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi pengelolanya, agar mereka selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam tata kelola zakat.

Untuk membangun kredibilitas serta mempertahankan kepercayaan para muzakki, khususnya dari kalangan pengusaha, BAZNAS Kalsel terus meningkatkan transparansi dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak. Laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik serta dokumentasi mengenai realisasi program menjadi bukti nyata bahwa dana zakat dikelola secara efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

c. Identitas Informan Ketiga

Nama: Ridwan Abdul Qadir Jailani

Agama: Islam

Jabatan: Plt Ketua Umum Hipmi Banjarmasin

Pekerjaan: Direktur Perusda PT. Bangun Banua

Berdasarkan informasi dari informan ketiga, informan mengatakan:

“Saya tahu tentang BAZNAS, tapi biasanya saya menyalurkan dana ZIS langsung kepada orang-orang sekitar saya yang membutuhkan. Dengan cara ini, saya merasa lebih yakin bahwa bantuan yang saya berikan benar-benar sampai ke pihak yang membutuhkan. Sejauh ini, saya belum pernah berpikir untuk menyalurkan ZIS ke BAZNAS. Saya lebih memilih menyalurkannya secara langsung karena saya bisa melihat sendiri penerima manfaatnya dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.” (Ridwan Abdul Qadir Jailani, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025)

Berdasarkan hasil temuan dari informan menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang lembaga BAZNAS, tetapi belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai operasionalnya. Informan lebih memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada masyarakat di sekitar mereka, termasuk tetangga dan masyarakat yang membutuhkan, karena merasa cara ini lebih efektif dalam memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat.

Mengenai kemungkinan menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS, informan menyatakan bahwa ia belum mempertimbangkan opsi tersebut. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap BAZNAS, melainkan lebih kepada kebiasaan menyalurkan dana secara langsung serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme distribusi dana yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Dalam pandangan informan terkait transparansi dan akuntabilitas baznas, informan mengatakan:

"Saya belum tahu secara detail bagaimana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, karena saya tidak pernah melihat langsung laporannya atau terobosan-terobosan apa yang mereka buat. Saya juga merasa bahwa saya jarang melihat sosialisasi dari BAZNAS, jadi sulit bagi saya untuk

menilai sejauh mana mereka transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana ZIS." (Ridwan Abdul Qadir Jailani, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, pandangan informan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas BAZNAS masih sulit untuk dinilai karena keterbatasan informasi yang tersedia bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum pernah melihat secara langsung laporan keuangan Baznas atau mengetahui langkah-langkah konkret yang dilakukan lembaga tersebut dalam memastikan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Selain itu, narasumber juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari BAZNAS terkait mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana.

Informan juga memberikan apa saja faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap lembaga filantropi seperti BAZNAS, informan mengatakan:

"Sosialisasi sangat penting. Lembaga seperti BAZNAS harus bisa menunjukkan bahwa mereka bekerja secara adil dan profesional dalam menyalurkan dana zakat. Saya pernah mendengar ada lembaga zakat yang hanya membantu orang-orang tertentu yang berada di lingkup mereka saja, padahal zakat harusnya diberikan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditetapkan. Jika BAZNAS bisa membuktikan bahwa mereka menyalurkan dana secara adil dan transparan, tentu masyarakat akan lebih percaya." (Ridwan Abdul Qadir Jailani, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025)

Menurut informan, kepercayaan masyarakat terhadap Baznas bergantung pada transparansi dan keadilan dalam pendistribusian zakat. Beliau menyampaikan bahwa masih ada kekhawatiran terkait lembaga zakat yang hanya menyalurkan bantuan kepada kelompok tertentu, padahal zakat seharusnya

diberikan kepada delapan golongan mustahik.

Sebagai saran, beliau menyatakan bahwa BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media, seperti media sosial dan publikasi terbuka, serta memastikan distribusi dana dilakukan secara merata ke berbagai wilayah agar lebih banyak masyarakat yang merasa terbantu.

d. Identitas Informan Keempat

Nama: Muhammad Ihsan Marais, ST

Agama: Islam

Jabatan: Ketua Bidang VIII (Tata Ruang, PU, dan Pembangunan Desa)

Pekerjaan: Direktur Marais Group

Berdasarkan informasi dari informan keempat, informan mengatakan:

"Iya, saya tahu tentang BAZNAS, tapi saya belum mengenal secara menyeluruh bagaimana sistem dan cara kerja mereka. Saya menyalurkannya kepada lingkungan sekitar, panti asuhan, dan keluarga yang termasuk 8 asnaf yang membutuhkan. Saya merasa lebih nyaman memberikan secara langsung karena saya tahu siapa yang benar-benar butuh." (Muhammad Ihsan Marais, ST, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025)

Informan menyatakan bahwa beliau mengetahui keberadaan BAZNAS, tetapi belum memahami secara menyeluruh bagaimana sistem dan cara kerja lembaga tersebut. Dalam menyalurkan dana ZIS, beliau lebih memilih memberikan bantuan langsung kepada lingkungan sekitar, panti asuhan, dan keluarga yang termasuk 8 asnaf yang membutuhkan. Beliau

beralasan bahwa dengan cara ini, beliau dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang tepat.

Mengenai pertimbangan untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, informan mengaku belum pernah mempertimbangkannya. Beliau khawatir bahwa jika dana yang disalurkan melalui BAZNAS, tidak semua penerima manfaat di lingkungannya akan merasakan manfaat dari dana tersebut. Beliau menilai bahwa pendistribusian yang dilakukan BAZNAS belum menyeluruh, sehingga banyak mustahik yang seharusnya menerima zakat tidak mendapatkannya.

Adapun pandangan informan dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap BAZNAS, informan mengatakan:

"Karena saya sendiri tidak pernah melihat laporan keuangan BAZNAS, saya tidak bisa menilai secara langsung tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Namun, dari obrolan dengan teman-teman dan lingkungan sekitar, ada kesan bahwa BAZNAS masih kurang dalam hal keterbukaan informasi. Mungkin jika ada lebih banyak sosialisasi mengenai bagaimana dana dikelola dan disalurkan, masyarakat akan lebih percaya." (Muhammad Ihsan Marais, ST, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025).

Berdasarkan informasi tersebut, pandangan informan terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS masih sulit untuk dinilai secara langsung karena ia belum pernah melihat laporan keuangan lembaga tersebut. Kurangnya paparan terhadap informasi tersebut membuatnya tidak dapat memberikan penilaian objektif mengenai sejauh mana BAZNAS menjalankan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Meskipun demikian, berdasarkan percakapannya dengan rekan-rekan dan lingkungan sekitar, terdapat kesan bahwa BAZNAS masih kurang dalam hal keterbukaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap transparansi lembaga tersebut belum sepenuhnya positif. Ia berpendapat bahwa jika BAZNAS lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengelolaan dan pendistribusian dana, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat meningkat.

Menurut informan, adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap BAZNAS beliau mengatakan:

"Faktor utama nya menurut saya adalah transparansi, terutama dalam melaporkan atau keuangan. Selain itu, orang-orang yang bekerja di dalamnya juga harus memiliki kredibilitas tinggi. Kalau mereka tidak bisa dipercaya, tentu sulit bagi masyarakat untuk menyalurkan dana melalui mereka." (Muhammad Ihsan Marais, ST, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025)

Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS adalah transparansi dalam pelaporan keuangan dan kredibilitas individu yang bekerja di dalamnya. Jika suatu lembaga tidak memiliki kredibilitas tinggi, masyarakat akan sulit mempercayakan dana mereka kepada lembaga tersebut.

e. Identitas Informan Kelima

Nama: Aulia Rizali Rahman

Agama: Islam

Jabatan: Ketua Bidang II (Keuangan dan Perbankan)

Pekerjaan: Direktur Ekspedisi

Berdasarkan informasi dari informan kelima, beliau mengatakan:

"Iya, saya tahu tentang BAZNAS. Saya sering mendengar nama lembaga ini disebut-sebut sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Tapi secara spesifik bagaimana sistem kerjanya, saya belum begitu paham. "Biasanya saya menyalurkan dana ZIS langsung ke masjid terdekat atau ke orang-orang yang saya rasa membutuhkan. Saya lebih sering menyerahkan zakat fitrah langsung ke masjid, karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu di keluarga saya." (Aulia Rizali Rahman, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga, dapat disimpulkan bahwa meskipun BAZNAS diakui sebagai lembaga pengelola zakat yang berada di bawah pemerintah, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terkait sistem kerja dan mekanisme penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Informan menyatakan bahwa selama ini ia lebih memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui masjid karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap lebih sederhana, dan manfaatnya lebih langsung dirasakan oleh penerimanya.

Salah satu alasan utama mengapa informan belum menyalurkan ZIS melalui BAZNAS adalah kurangnya informasi mengenai prosedur dan metode distribusi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana cara menyalurkan dana ke BAZNAS dan bagaimana proses pendistribusiannya kepada para mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS masih

perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami bagaimana dana yang dihimpun dikelola dan disalurkan secara transparan. Sosialisasi yang kurang membuat banyak masyarakat hanya sekedar mengetahui keberadaan BAZNAS, tetapi tidak memahami secara rinci bagaimana mekanisme kerjanya.

Informan memberikan pandangannya terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, informan mengatakan:

"Sejujurnya, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti karena saya belum pernah melihat langsung bagaimana transparansi mereka dalam mengelola dana. Saya tahu BAZNAS itu lembaga resmi di bawah pemerintah, tapi karena saya tidak mempunyai cukup informasi tentang hal itu bagaimana mereka bekerja, saya tidak bisa memberikan penilaian secara spesifik." (Aulia Rizali Rahman, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025).

Terkait transparansi dan akuntabilitas, informan mengaku belum pernah melihat laporan keuangan BAZNAS, sehingga ia tidak dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai aspek tersebut. Namun, ia menilai bahwa sebagai lembaga resmi di bawah pemerintah, kredibilitas BAZNAS seharusnya sudah baik. Meski demikian, tanpa adanya akses yang mudah terhadap informasi terkait pengelolaan dana, masyarakat tetap akan ragu untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini.

"Menurut saya, kurangnya sosialisasi ke masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar BAZNAS. Banyak orang tahu nama BAZNAS, tapi tidak banyak yang benar-benar paham bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menyalurkan dana, atau bagaimana sistemnya. Contohnya seperti saya, saya tahu BAZNAS itu ada, tapi saya tidak tahu secara detail bagaimana mereka mengelola dana zakat yang masuk. Kalau mereka bisa lebih aktif dalam memberikan sosialisasi, baik itu melalui media sosial, seminar, atau kegiatan lainnya, saya rasa akan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk menyalurkan zakat melalui mereka." (Aulia Rizali Rahman, komunikasi pribadi, 7 Maret

2025)

Informan menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga tersebut memperkenalkan diri dan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Menurutnya, ada lembaga zakat lain yang lebih aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan berbagai kegiatan langsung. Lembaga tersebut secara rutin menunjukkan laporan kegiatan, program yang telah dijalankan, dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Cara seperti ini dianggap penting agar masyarakat lebih mengenal dan memahami bagaimana lembaga zakat bekerja dalam menyalurkan dana yang mereka kelola.

f. Identitas Informan Keenam

Nama: Hendra Kalam

Agama: Islam

Jabatan: Anggota Hipmi Banjarmasin

Pekerjaan: Pengusaha Properti dan Tanah Kavling

Berdasarkan informasi dari informan keenam, beliau mengatakan:

"Iya, saya kenal BAZNAS, tapi jujur saya belum terlalu paham bagaimana lembaga ini bekerja. Saya tahu mereka mengelola zakat, infak, dan sedekah, tapi belum pernah mencari tahu lebih dalam mengenai sistem pengelolaannya. Biasanya saya menyalurkan dana ZIS ke masjid terdekat. Kadang juga saya menyalurkan melalui Rumah Zakat. Saya merasa lebih nyaman karena bisa langsung melihat dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan." (Hendra Kalam, komunikasi pribadi, 12 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keempat, Informan mengaku mengenal BAZNAS, namun belum memahami secara mendalam bagaimana lembaga tersebut beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS memiliki eksistensi yang cukup dikenal di masyarakat, masih terdapat kesenjangan informasi terkait mekanisme kerja dan sistem pengelolaan dana yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Informan lebih memilih menyalurkan dana ZIS melalui masjid atau lembaga lain seperti Rumah Zakat. Pilihan ini didasarkan pada faktor kenyamanan dan keyakinan bahwa penyaluran secara langsung memungkinkan informan untuk melihat dampak yang lebih nyata terhadap penerima manfaat.

Informan juga mengungkapkan bahwa ia belum pernah mempertimbangkan BAZNAS sebagai lembaga penyalur dana ZIS, terutama karena kurangnya informasi mengenai laporan keuangan lembaga tersebut. Informan juga baru mengetahui bahwa BAZNAS sebenarnya telah mengunggah laporan keuangan di situs resmi dan media sosialnya. Informan menyatakan bahwa ia belum pernah melihat laporan keuangan BAZNAS dan tidak mengetahui bahwa laporan tersebut telah tersedia secara daring. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi yang telah diterapkan oleh BAZNAS belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dalam pengelolaan

dana zakat.

Informan juga memberikan pandangan tentang transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, informan mengatakan:

“Karena saya tidak terlalu mengikuti informasi tentang BAZNAS, saya juga belum bisa menilai transparansi dan akuntabilitasnya. Meskipun sudah ada informasi yang disampaikan, saya tetap merasa lebih aman jika menyalurkan zakat langsung ke masjid atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Jujur, karena saya tidak pernah melihat langsung bagaimana mereka mengelola dana, saya belum bisa memberikan penilaian yang pasti. Tapi kalau memang laporan-laporan keuangan sudah tersedia secara terbuka, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan ke depannya. Cuma tetap saja, menurut saya, transparansi itu bukan hanya sekadar laporan, tapi bagaimana mereka bisa memastikan masyarakat tahu dan percaya bahwa dana benar-benar disalurkan dengan baik.” (Hendra Kalam, komunikasi pribadi, 12 Maret 2025)

Berdasarkan pandangan informan, karena keterbatasan informasi yang dimilikinya, informan belum dapat memberikan penilaian yang pasti terkait transparansi dan akuntabilitas BAZNAS. Meskipun telah diberikan informasi mengenai publikasi laporan keuangan BAZNAS, informan tetap lebih memilih menyalurkan dana ZIS melalui jalur yang lebih dapat di pantau secara langsung. Informan menilai bahwa akuntabilitas dan transparansi lebih dari sekadar menyediakan catatan keuangan keduanya juga melibatkan verifikasi bahwa penyaluran dana benar-benar terealisasi. Menurutnya, masyarakat memerlukan bukti nyata bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS beliau berpendapat:

"Menurut saya, transparansi dan akuntabilitas itu memang penting, tapi yang lebih utama adalah validasi. Masyarakat butuh bukti nyata bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar sampai ke yang berhak. Jadi bukan hanya soal laporan keuangan di situs atau media sosial, tapi bagaimana cara BAZNAS menunjukkan ke publik bahwa bantuan mereka benar-benar tersalurkan dan tepat sasaran. Kalau itu bisa dibuktikan, saya rasa kepercayaan masyarakat pasti akan meningkat." (Hendra Kalam, komunikasi pribadi, 12 Maret 2025)

Menurut informan, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Selain itu, validasi terhadap penyaluran dana juga menjadi aspek penting, karena masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa dana telah disalurkan, tetapi juga membutuhkan bukti nyata mengenai realisasi distribusinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan, lembaga pengelola zakat perlu menyajikan laporan yang lebih terstruktur dan memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, informan menyarankan agar Baznas memperkuat transparansi dan akuntabilitasnya dengan memberikan bukti nyata terkait penyaluran dana. Selain itu, BAZNAS disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di kegiatan langsung seperti seminar dan diskusi yang melibatkan para muzakki. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana

oleh BAZNAS serta membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap lembaga tersebut.

g. Identitas Informan Ketujuh

Nama: H. Aulia Rahman, ST

Agama: Islam

Jabatan: Ketua Umum BPC Hipmi Banjarmasin dan Ketua

Bidang X (Pendidikan, Riset, Sosial, Pemuda dan Olahraga)

Pekerjaan: Direktur Utama PT. Pesona Bintang Kalimas

Berdasarkan informasi dari informan ketujuh, informan mengatakan:

“Iya saya tahu dengan lembaga BAZNAS, namun biasanya saya menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui beberapa saluran. Saya sering memberikan ZIS melalui masjid setempat karena di sana ada amil zakat yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat sekitar. Selain itu, saya juga menyalurkan dana ZIS melalui lembaga amil zakat Muhammadiyah atau Lazismu.” (H. Aulia Rahman, ST, komunikasi pribadi, 21 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa informan telah mengenal BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia. Namun informan lebih sering menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui masjid, pengumpul zakat lokal, dan lembaga pengumpul zakat (Lazismu) Muhammadiyah. Meskipun demikian, informan menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan BAZNAS sebagai salah satu lembaga penerima zakat di masa depan. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangannya adalah adanya kemungkinan kerja sama yang dapat dijalin dengan BAZNAS.

Informan juga memberikan pandangan terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, informan mengatakan:

"Saya melihat bahwa BAZNAS sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar adanya permasalahan serius mengenai pengelolaan dana mereka. Jika memang ada laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, saya rasa itu sudah menjadi langkah yang baik untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, bagi masyarakat yang mungkin belum terbiasa mencari informasi semacam ini, akan lebih baik jika BAZNAS melakukan sosialisasi lebih luas terkait bagaimana mereka mengelola dana zakat, infak, dan sedekah." (H. Aulia Rahman, ST, komunikasi pribadi, 21 Maret 2025).

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, informan berpendapat bahwa BAZNAS telah menjalankan perannya dengan baik, mengingat tidak ada keluhan yang ia dengar dari masyarakat terkait pengelolaan dana oleh lembaga tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa transparansi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, upaya BAZNAS untuk mendorong keterbukaan informasi akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Selain itu, informan menilai bahwa kredibilitas BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat nasional sudah sangat baik dan tidak perlu diragukan.

Menurut informan adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, informan mengatakan:

"Menurut saya, faktor utama yang sangat berpengaruh adalah transparansi. Masyarakat ingin tahu ke mana dana yang mereka titipkan disalurkan dan apakah benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Selain itu, faktor lain seperti reputasi lembaga, rekam jejak pengelolaan dana, serta adanya laporan keuangan

yang jelas juga sangat berpengaruh.” (H. Aulia Rahman, ST, komunikasi pribadi, 21 Maret 2025).

Transparansi merupakan faktor utama yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Salah satu faktor terpenting dalam keputusan muzakki untuk menyalurkan zakatnya adalah kejelasan pengelolaan dana dan pelaporan keuangan.. Selain itu, reputasi lembaga dan rekam jejak pengelolaan dana juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Untuk meningkatkan minat masyarakat agar lebih banyak menyalurkan zakat melalui BAZNAS, informan menyarankan agar lembaga ini lebih banyak mengembangkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kalsel

No	Nama	Keterangan
1	Muhammad Arsyad, SE (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)	Bapak Muhammad Arsyad, SE, menjelaskan bahwa transparansi BAZNAS Kalimantan Selatan diwujudkan melalui pelaporan dana berkala kepada pemerintah, muzaki, dan masyarakat, serta dapat diakses melalui situs resmi BAZNAS dan media sosial. Dalam aspek akuntabilitas, ia mengungkapkan bahwa BAZNAS menjalani audit rutin oleh Kantor Akuntan Publik, Satuan Audit Internal, dan Kementerian Agama. Undang-undang dan standar akuntansi yang terus berubah menjadi salah satu kendala terbesar dalam menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan uang zakat seperti peralihan dari PSAK 109 ke PSAK 409, yang menuntut pemahaman mendalam bagi pengelola dana zakat.

2	Muhammad Adi Riswan Al Mubarak (Kepala Bagian Promosi dan Komunikasi)	Bapak Muhammad Adi Riswan Al Mubarak menyatakan bahwa hingga saat ini BAZNAS Kalimantan Selatan belum menjalin kerja sama langsung dengan HIPMI, namun sangat terbuka terhadap peluang kolaborasi di masa depan karena komunitas pengusaha seperti HIPMI memiliki potensi besar dalam mendukung program zakat, baik dari segi pendanaan maupun inovasi pemberdayaan masyarakat. Untuk membangun kepercayaan, BAZNAS menekankan transparansi dengan membuka akses informasi keuangan. Adapun integritas pengelolaan dana dijaga melalui seleksi ketat, audit berkala, dan pelatihan rutin bagi pengelola zakat.
---	---	--

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara dengan Pengurus HIPMI Banjarmasin

No	Nama	Keterangan
1	Ridwan Abdul Qadir Jailani (Plt Ketua Umum Hipmi Banjarmasin)	Bapak Ridwan Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa beliau mengetahui keberadaan BAZNAS, namun lebih memilih mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara langsung kepada individu di sekitarnya. Beliau belum mempertimbangkan untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, bukan karena kurangnya

		kepercayaan, melainkan karena kebiasaan serta keterbatasan informasi mengenai mekanisme pengelolaan dana oleh lembaga tersebut. Terkait transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, beliau menyatakan bahwa belum memiliki pemahaman yang mendalam karena minimnya akses terhadap laporan keuangan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Selain itu, ia menekankan bahwa kepercayaan terhadap lembaga zakat bergantung pada prinsip keadilan dalam distribusi dana, sehingga BAZNAS perlu memastikan penyaluran zakat sesuai ketentuan kepada delapan kelompok mustahik yang berhak menerimanya.
2	Muhammad Ihsan Marais, ST (Ketua Bidang VIII (Tata Ruang, PU, dan Pembangunan Desa))	Bapak Muhammad Ihsan Marais, ST, menjelaskan bahwa beliau mengetahui keberadaan BAZNAS, namun belum memahami secara mendalam sistem dan mekanisme operasionalnya. Dalam menyalurkan dana ZIS, beliau lebih memilih menyalurkan secara langsung kepada individu di lingkungan sekitar, panti asuhan, serta keluarga yang termasuk dalam kategori delapan asnaf. Terkait kemungkinan menyalurkan dana ZIS melalui

		BAZNAS, informan menyatakan belum mempertimbangkan opsi tersebut. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS belum merata, sehingga masih terdapat mustahik yang tidak memperoleh manfaat dari dana yang disalurkan. Selain itu, ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas BAZNAS masih sulit diukur, karena dirinya belum pernah mengakses laporan keuangan atau informasi terkait mekanisme distribusi dana yang dilakukan lembaga tersebut. Lebih lanjut, informan menyebutkan bahwa berdasarkan percakapan dengan kolega dan lingkungan sekitar, terdapat persepsi bahwa BAZNAS masih kurang dalam hal keterbukaan informasi.
3	Aulia Rizali Rahman (Ketua Bidang II (Keuangan dan Perbankan))	Bapak Aulia Rizali Rahman menjelaskan bahwa beliau mengetahui BAZNAS, namun beliau belum sepenuhnya memahami sistem dan cara kerja lembaga tersebut. Sebagai gantinya, ia lebih memilih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) langsung ke masjid atau orang yang membutuhkan. Informan menyatakan bahwa ia belum mempertimbangkan untuk

		menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, karena kurangnya informasi mengenai teknik dan mekanisme distribusi yang digunakan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS perlu meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami cara kerja lembaga ini. Terkait transparansi dan akuntabilitas, Aulia Rizali Rahman mengaku tidak pernah melihat laporan keuangan BAZNAS, sehingga ia tidak dapat memberikan penilaian mengenai hal tersebut. Meskipun BAZNAS memiliki status resmi di bawah pemerintah, kurangnya informasi membuat masyarakat seperti dirinya merasa ragu.
4	Hendra Kalam (Anggota Hipmi Banjarmasin)	Bapak Hendra Kalam mengaku mengenal BAZNAS, tetapi ia belum memahami secara mendalam bagaimana lembaga tersebut beroperasi. Ia lebih memilih menyalurkan ZIS melalui masjid atau lembaga lain seperti Rumah Zakat. Informan mengungkapkan bahwa ia belum mempertimbangkan untuk menyalurkan ZIS melalui BAZNAS, karena kurangnya informasi mengenai laporan keuangan lembaga tersebut. Terkait transparansi dan akuntabilitas,

		Hendra Kalam menyatakan bahwa meskipun laporan keuangan sudah tersedia, ia masih merasa lebih aman menyalurkan zakat secara langsung. Ia menilai transparansi tidak hanya bergantung pada ketersediaan laporan, tetapi juga pada bukti nyata penyaluran dana yang tepat sasaran. Informan percaya bahwa masyarakat membutuhkan validasi mengenai penyaluran dana untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
5	H. Aulia Rahman, ST (Ketua Umum BPC Hipmi Banjarmasin dan Ketua Bidang X (Pendidikan, Riset, Sosial, Pemuda dan Olahraga))	Bapak H. Aulia Rahman, menjelaskan bahwa beliau mengetahui tentang BAZNAS namun lebih memilih pendistribusian uang zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga penghimpun zakat (Lazismu), penghimpun zakat, dan masjid-masjid terdekat. Meski demikian, ia terbuka untuk mempertimbangkan BAZNAS sebagai lembaga penerima zakat di masa depan. Terkait transparansi dan akuntabilitas, informan menilai bahwa BAZNAS telah menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau tidak mendengar adanya keluhan serius mengenai pengelolaan dana oleh lembaga tersebut. Namun, ia mengakui bahwa meskipun laporan keuangan BAZNAS dapat

		diakses, sosialisasi mengenai cara pengelolaan dana masih perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dilakukan secara terbuka. Selain itu, narasumber mengatakan bahwa BAZNAS memiliki kredibilitas yang sangat baik dan tidak perlu diragukan lagi.. Faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, menurut informan, adalah transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan. Masyarakat ingin memastikan orang yang tepat menerima uang yang mereka salurkan. Selain transparansi, reputasi lembaga dan rekam jejak pengelolaan dana juga memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan publik.
--	--	--

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui proses wawancara dengan pengurus atau perwakilan anggota HIPMI Banjarmasin, ditemukan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat pemahaman yang masih terbatas terhadap transparansi dan akuntabilitas yang dijalankan oleh BAZNAS Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari banyaknya jawaban yang menunjukkan ketidaktahuan terhadap program-program BAZNAS, termasuk laporan keuangan serta bentuk penyaluran

zakat kepada masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS belum sepenuhnya menjangkau kalangan pengusaha muda, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan langsung dalam menyampaikan informasi kepada kelompok ini.

B. Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari para informan mengenai tingkat Kepercayaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banjarmasin terhadap Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai Lembaga Filantropi Islam, bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta bagaimana persepsi kepercayaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah.

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang menekankan pentingnya penyediaan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat umum, dan muzakki. Salah satu asas mendasar pengelolaan dana zakat adalah transparansi, karena transparansi

memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana lembaga pengelola zakat seperti Baznas menjalankan tugasnya secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya menyangkut penyediaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana informasi tersebut disampaikan, sejauh mana dapat diakses, serta apakah masyarakat benar-benar memahami dan merasa terlibat dalam prosesnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kalsel telah menunjukkan upaya yang cukup optimal dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lembaga ini secara berkala menyusun dan mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana, baik dalam bentuk laporan tahunan, infografik, maupun unggahan melalui media sosial resmi. Untuk menyampaikan pelaporan, BAZNAS Kalsel menggunakan berbagai saluran website resmi <https://kalsel.baznas.go.id> serta melalui berbagai media sosial seperti Instagram @baznas.kalsel, Facebook Baznas Provinsi Kalsel, dan Twitter @BaznasKalsel. Laporan yang dipublikasikan mencakup jumlah dana yang masuk, sumber dana, serta distribusi kepada mustahik. Selain itu, BAZNAS Kalsel juga mengunggah laporan analisis rasio dan transparansi yang diawasi langsung oleh BAZNAS RI sebagai entitas utama yang bertanggung jawab atas regulasi zakat nasional.

Transparansi yang dilakukan BAZNAS Kalsel sejalan dengan indikator transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Dalam hal ini, BAZNAS

sudah berupaya menjadi lembaga yang informatif melalui penyajian data dan informasi yang tersusun secara sistematis serta mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya keterbukaan pun tercermin dari kemudahan akses terhadap berbagai saluran informasi yang disediakan secara daring, sehingga memungkinkan publik untuk mengikuti perkembangan kinerja lembaga secara langsung. Sementara itu, dari sisi pengungkapan, adanya laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan terbuka mengindikasikan komitmen Baznas dalam menjunjung kejujuran serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Menurut peneliti, meskipun BAZNAS Kalsel telah menunjukkan upaya transparansi melalui berbagai media, namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh kalangan, baik masyarakat umum maupun anggota HIPMI. Peneliti menemukan bahwa masih banyak di antara mereka yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai peran, program, dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Menurut peneliti agar semua lapisan masyarakat, terutama wirausahawan muda, dapat lebih merata dalam menyerap dan memahami pengetahuan tentang BAZNAS, maka teknik sosialisasi perlu diperkuat dan disinkronisasikan.

Selanjutnya, terkait dengan akuntabilitas, hal ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif atas amanah yang telah

dipercayakan kepada sebuah lembaga. Dalam hal ini, BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana zakat, akuntabilitas tidak hanya menyangkut pelaporan formal kepada otoritas terkait, tetapi juga menyiratkan keterbukaan, ketepatan, dan kejujuran dalam menjelaskan bagaimana dana umat dikelola dan didistribusikan.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kalimantan Selatan menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan aspek utama dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk menjamin hal tersebut, BAZNAS menjalani audit secara rutin setiap tahunnya oleh pihak internal maupun eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selain itu, Kementerian Agama juga turut berperan dalam melakukan audit syariah guna memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, bentuk akuntabilitas yang diterapkan tidak hanya mencakup aspek administratif dan profesional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual yang melekat pada lembaga zakat sebagai institusi keagamaan.

Selain diaudit oleh pihak eksternal, BAZNAS juga memiliki mekanisme pengawasan internal melalui keberadaan Satuan Audit Internal (SAI), yang berperan sebagai unit pengendali internal di lingkungan lembaga. SAI secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program.

Akuntabilitas yang dijalankan BAZNAS Kalsel sejalan dengan indikator yang dikemukakan oleh Dadang Solihin. Pertama, kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang ditetapkan terlihat dari pelaksanaan program yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional, mulai dari identifikasi mustahik hingga pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Kedua, adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian, diimplementasikan melalui sistem audit internal dan eksternal yang memungkinkan pendeteksian pelanggaran, dengan tindak lanjut berupa sanksi administratif dan perbaikan prosedural. Ketiga, output dan outcome yang terukur, diwujudkan dalam laporan berkala yang memuat jumlah dana terhimpun, capaian program, serta dampaknya terhadap mustahik, yang dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan otoritas.

Dalam perspektif Islam, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar bagian dari tata kelola modern, tetapi juga merupakan bagian integral dari amanah keagamaan yang harus ditunaikan secara jujur dan terbuka. Konsep transparansi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan nilai tabligh, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan tidak ditutupi, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Maidah ayat 67. Artinya, keterbukaan informasi oleh BAZNAS dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit, publikasi melalui media sosial, dan pelaporan kegiatan kepada masyarakat bukan hanya memenuhi tuntutan profesionalisme, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dakwah dalam menyampaikan amanah publik. Sementara itu, akuntabilitas dalam Islam mengacu pada prinsip amanah, yakni kewajiban moral untuk

mempertanggungjawabkan tugas kepada manusia dan kepada Allah SWT, seperti termaktub dalam QS. An-Nisā' ayat 58. Ketika BAZNAS mempertanggungjawabkan dana zakat kepada publik melalui audit eksternal dan mekanisme pelaporan periodik, hal itu mencerminkan bentuk konkret dari nilai akuntabilitas Islam, di mana setiap pengelola akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan kepadanya.

2. Tingkat Kepercayaan HIPMI Banjarmasin terhadap Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS sebagai Lembaga Filantropi Islam

Kepercayaan adalah keyakinan atau harapan seseorang terhadap kejujuran, kebaikan, dan kemampuan orang lain. Kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas sebuah lembaga filantropi Islam, termasuk BAZNAS. Dalam konteks ini, kepercayaan dari kalangan pelaku usaha seperti pengurus HIPMI Banjarmasin menjadi indikator signifikan untuk menilai sejauh mana BAZNAS Kalsel telah menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Kepercayaan tersebut, secara umum, dapat dinilai melalui beberapa indikator utama, yakni kejelasan informasi, keterbukaan laporan, partisipasi publik, konsistensi kinerja, dan komitmen lembaga terhadap prinsip pertanggungjawaban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar anggota HIPMI Banjarmasin belum sepenuhnya menaruh kepercayaan yang kuat terhadap BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam. Sikap hati-hati dan keraguan yang muncul tidak mencerminkan penolakan secara langsung, namun lebih mengarah pada ketidakpastian akibat beberapa

faktor yang bersifat sistemik maupun pengalaman pribadi. Sebagian besar informan belum memperoleh informasi yang cukup rinci dan terorganisir tentang fungsi, output, dan keberhasilan program BAZNAS.

Lebih lanjut, beberapa anggota HIPMI Banjarmasin juga mengemukakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman pribadi dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah atau dana sosial lainnya melalui BAZNAS. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap suatu lembaga tidak hanya bergantung pada informasi dan legitimasi formal, tetapi juga dibentuk dari pengalaman langsung yang menciptakan persepsi positif atau sebaliknya. Dalam beberapa kasus, individu lebih memilih menyalurkan zakat melalui jalur yang dirasa lebih dekat secara emosional, seperti yayasan keluarga, komunitas internal, atau masjid tempat mereka beraktivitas, yang menunjukkan pentingnya dimensi kedekatan sosial dalam membentuk kepercayaan publik.

Dari sisi persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas program, sebagian informan menyampaikan bahwa mereka belum dapat merasakan secara langsung dampak dari program-program yang dijalankan BAZNAS. Program-program tersebut dinilai belum sepenuhnya menyentuh kalangan pelaku usaha secara signifikan, baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, maupun akses pendanaan produktif.

Jika dikaji lebih lanjut menggunakan indikator kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman, yaitu kompetensi,

integritas, dan niat baik belum sepenuhnya terbangun dalam persepsi sebagian besar anggota HIPMI Banjarmasin terhadap BAZNAS. Dalam hal kompetensi, beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum melihat secara langsung kemampuan BAZNAS dalam merancang dan menjalankan program yang berdampak pada sektor ekonomi produktif, terutama yang menyentuh kalangan pengusaha muda. Meskipun program-program telah berjalan, keterbatasan akses terhadap informasi maupun kurangnya pelibatan dalam proses distribusi membuat persepsi terhadap kompetensi lembaga masih terbatas.

Sementara itu, dari aspek integritas, meskipun BAZNAS telah melakukan pelaporan secara terbuka dan menjalani audit secara berkala, hal tersebut belum menjangkau komunitas HIPMI secara optimal. Minimnya komunikasi langsung menyebabkan informasi yang bersifat administratif ini belum mampu memperkuat keyakinan anggota terhadap kredibilitas lembaga. Adapun terkait niat baik (*benevolence*), ketiadaan pendekatan personal maupun inisiatif komunikasi dua arah menyebabkan sebagian besar anggota belum merasakan adanya kepedulian yang bersifat langsung dari lembaga terhadap kepentingan dan dinamika komunitas mereka.

Kepercayaan anggota HIPMI Banjarmasin terhadap BAZNAS tampaknya belum tumbuh secara utuh, yang tercermin dari lemahnya persepsi terhadap tiga indikator utama kepercayaan: kompetensi, integritas, dan niat baik. Meskipun BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui audit rutin

serta pelaporan terbuka, hal tersebut belum cukup untuk membangun kedekatan emosional dan keyakinan yang kuat di kalangan pelaku usaha.

Dalam ajaran Islam, konsep kepercayaan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan berakar pada prinsip amanah, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut menegaskan bahwa menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan merupakan bagian dari keimanan dan tanggung jawab sosial seorang Muslim. Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), prinsip ini menuntut adanya pelaksanaan yang tidak hanya profesional, tetapi juga penuh transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kepercayaan publik termasuk dari kalangan HIPMI Banjarmasin tidak akan terbentuk hanya melalui laporan administratif, tetapi juga melalui peneguhan nilai-nilai syariah yang terlihat nyata dalam perilaku lembaga dan keberpihakan programnya kepada umat.